

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Rambu Lalu Lintas

##### A.1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah “melakukan sesuatu dengan disengaja atau lalai dalam melakukan baik itu perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada”.<sup>7</sup> Pengertian pelanggaran menurut Wirjono Projodikoro “adalah *“overtredingen”* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum”. Bambang Poernomo dalam bukunya Wirjono Projodikoro mengemukakan “bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*”. “*Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.<sup>8</sup>

Pelanggaran menurut pandangan Andi Hamzah bahwa pembagian suatu delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. “Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur ulang dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana,

---

<sup>7</sup> Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, Op.cit

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana. Refika Aditama, Bandung, Hlm 33

sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya diapandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang”.<sup>9</sup>

## **A.2. Pelanggaran Dalam Prespektif Hukum Pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia membuat pembagian atas tindak pidana yaitu buku kedua mengatur tentang kejahatan dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. “Setiap perbuatan yang bertentangan dengan buku kedua disebut kejahatan dan perbuatan yang bertentangan dengan buku ketiga disebut pelanggaran”. Antara kejahatan dan pelanggaran tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik ataupun merupakan perbuatan yang melawan hukum. “Namun jika dilihat dari hukuman yang diterima orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran tentu saja berbeda, kejahatan diancam dengan hukuman yang jauh lebih berat daripada pelanggaran”.<sup>10</sup>

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kuantitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah. 2008, Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta hlm 106

<sup>10</sup> <https://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf> diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.00 WIB

kejahatan. Menurut pandangan JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa “perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan”.<sup>11</sup>

### **A.3. Rambu Lalu Lintas**

#### **A.3.1. Pengertian Rambu Lalu Lintas**

Rambu lalu lintas telah dijabarkan dalam bab 1 pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Rambu Lalu lintas. Dijelaskan bahwa Rambu lalu lintas adalah “bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Bentuk rambu lalu lintas ada dua, yaitu model konvensional dengan bahan aluminium yang mampu memantulkan cahaya, dan rambu yang dibuat secara elektronik dengan penyampaian informasinya dapat diatur secara elektronik”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Poernomo. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal40

<sup>12</sup> Lihat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 *Tentang Rambu Lalulinta*, Op.cit

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2004 tentang rambu Lalu lintas terdapat empat jenis rambu lalu lintas, diantaranya adalah rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah dan, rambu petunjuk :<sup>13</sup>

1. “Rambu peringatan berwarna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, dan huruf atau angka hitam. Artinya menginformasikan kondisi jalan yang membutuhkan kewaspadaan lebih dari pengguna jalan. Misalnya, peringatan daerah rawan kecelakaan, permukaan jalan licin, dan banyak pejalan kaki”.
2. “Rambu larangan menggunakan warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf atau angka hitam, dan kata-kata merah. Informasi di dalamnya berfungsi melarang perbuatan pengguna jalan. Misalnya, dilarang masuk, berhenti, parkir, atau memutar balik. Rambu larangan berlaku di area yang ditentukan atau tidak lagi berlaku hingga terdapat rambu batas akhir larangan”.
3. “Rambu batas akhir berwarna putih, garis tepi hitam, lambang hitam, huruf atau angka hitam,. Rambu ini bisa dikenali sebagai versi hitam-putih rambu larangan. Rambu perintah menyatakan perintah wajib untuk pengguna jalan. Rambu ini bisa dilihat berwarna dasar biru, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih, dan kata-kata putih. Misalnya, perintah mengikuti arus, belok kiri langsung, atau batas kecepatan 50 kpj(Kilometer Perjam)”.

---

<sup>13</sup> Ibid

4. “Rambu petunjuk berfungsi memandu pengguna jalan selama perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Rambu ini biasanya menunjukkan jurusan, batas wilayah, dan lokasi fasilitas umum. Rambu ini bisa dikenali dengan warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih. Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata berwarna dasar coklat, garis tepi putih, lambang putih, serta huruf atau angka putih”.

#### **A.3.2. Rambu Lalu Lintas “Dilarang Memutar Balik”**

Rambu lalu lintas dilarang memutar balik “merupakan sebuah rambu larangan, dimana rambu larangan digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan, rambu ini termasuk rambu larangan. Digunakan untuk memberitahu pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk memutar balik kendaraannya”. Rambu ini biasanya dipasang pada area yang berbahaya untuk memutar balik, misalnya saja di dekat persimpangan atau lampu merah di mana arus kendaraan dari arah berlawanan sangat ramai. Rambu dilarang memutar balik juga telah diatur sedemikian rupa di area tertentu untuk mengurangi kemacetan akibat penumpukan kendaraan di area putar balik. “Meskipun keadaan jalan dalam kondisi sepi sekalipun, sebagai pengendara bermotor tidak boleh melanggar rambu lalu lintas yang satu ini karena potensi bahaya yang bisa terjadi setiap saat”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><https://www.aca.co.id/Product-News-Detail/Rambu-rambu-Lalu-Lintas-yang-Banyak-Di-sepelekan> Diakses pada tanggal 13 Mei 2019

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

### **B.1. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas**

Pelanggaran lalulintas adalah “perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan mengemudikan kendaraan umum ataupun bermotor, termasuk juga pejalan kaki, yang berjalan dengan tidak memetui peraturan perundang-undnagan lalulintas yang berlaku”.<sup>15</sup> Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan “bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas”.<sup>16</sup>

Dalam petunjuk lapangan tersebut menggolongkan pelanggaran peraturan lalu lintas ke dalam tiga golongan berikut:<sup>17</sup>

- a. “Pelanggaran lalu lintas berat, seperti melanggar kecepatan, tanda pengatur lalu lintas, trayek, ketentuan menaikn atau menurunkan penumpang, dan batas muatan”.
- b. “Pelanggaran lalu lintas biasa, seperti melanggar tanda larangan masuk pada jam tertentu, memutar balik, dan ketentuan masa berlaku surat-surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau SIM”.

---

<sup>15</sup>Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 1993, Op.cit

<sup>16</sup> Ramdlon Naning. 1982. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu.Yogyakarta.hal 33

<sup>17</sup>Farouk Muhammad, 1999, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 12

- c. “Pelanggaran lalu lintas khusus dan ringan, seperti berhenti di jalur lalu lintas, sementara masih ada tempat di luar jalur, melanggar garis batas berhenti, dan meninggalkan kendaraan dalam keadaan mesin hidup”.

## **B.2. Pengaturan Rambu Lalu Lintas Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Petugas yang Berwenang :<sup>18</sup>

Pasal 102 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).”
2. “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.”
3. “Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Pasal 103 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.”
2. “Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.”

---

<sup>18</sup> Lihat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

3. “Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.”
4. “Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas :<sup>19</sup>

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

### **B.3. Ketentuan Tentang Rambu Lalu Lintas “Dilarang Memutar Balik”**

Diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas :<sup>20</sup>

1. “Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.”
2. “Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu”:
  - a. larangan berjalan terus;
  - b. larangan masuk;
  - c. larangan parkir dan berhenti;
  - d. larangan pergerakan lalu lintas tertentu;
  - e. larangan membunyikan isyarat suara;
  - f. larangan dengan kata-kata; dan
  - g. batas akhir larangan.

---

<sup>19</sup> Lihat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 *Tentang Rambu Lalulinta*, Op.cit

<sup>20</sup> Ibid



Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

- (1) “Rambu larangan berjalan terus sebagaimana dimaksud dalam P asal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas rambu”:
- a. “larangan berjalan terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya”
  - b. “larangan berjalan terus karena wajib memberi prioritas kepada arus lalu lintas dari arah yang diberi prioritas”
  - c. “larangan berjalan terus sebelum melaksanakan kegiatan tertentu”
  - d. “larangan berjalan terus pada bagian jalan tertentu dan sebelum mendahului arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan”
  - e. “larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik” dan
  - f. “larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.”
- (4) Rambu larangan pergerakan lalu lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas rambu:
- a. larangan berjalan terus;
  - b. larangan belok kiri;
  - c. larangan belok kanan;
  - d. larangan menyalip kendaraan lain;
  - e. larangan memutar balik;
  - f. larangan memutar balik dan belok kanan;
  - g. larangan mendekati kendaraan di depan dengan jarak sama atau kurang dari ... meter; dan
  - h. larangan menjalankan kendaraan dengan kecepatan lebih dari ... kilometer per jam.

Adapun sanksi bagi para pelanggar terhadap pelanggaran rambu lalu lintas juga telah diatur dalam pasal 287 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Yang berbunyi “Setiap

pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.00,00 ribu.”<sup>21</sup>

## C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

### C.1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

“Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana ini identik dengan penanggulanagan kejahtan”.<sup>22</sup> Digunakannya hukum pidana di indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan,tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari prakteknya dalam perundang-undanagan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. “Penggunaan hukum pidana adalah sebagai suatu hal yang wajar dan normal,seolah-olah *eksistensinya* tidak dipersoalkan”.<sup>23</sup>

“Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan”. Di

---

<sup>21</sup> Lihat undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat (1) *Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan*,Op.cit

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta., hlm 28

<sup>23</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta,hlm 58-59

sisni tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai *alternatif* yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. “Oleh karena itu, dengan politik hukum ini, negara diberikan kewenangna merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan *represif* terhadap setiap orang yang melanggarnya”. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni “memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang *represif* negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang di rumuskan sebagai tindak pidana”.<sup>24</sup>

“Penggunaan upaya hukum pidana termasuk salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah kebijakan maka penggunaan hukum pidana bukan suatu keharusan”.<sup>25</sup> Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial, yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, hal 149

kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>26</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik Kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>27</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) ;
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) ;
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media (*influencing views of society on crime and punishment/masmedia*).

“Penanggulanagan kejahatan seyogianya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” maupun sarana “non-penal”, baik dengan melakukan “pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum” (*“treatment of offenders”*) maupun dengan “pembinaan/penyembuhan masyarakat” (*“treatment of society”*). Pengertiann “*treatment of society*” dapat dilihat dalam arti “upaya pembinaan/penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahtan (antara lain faktor kesenjangana sosial-ekonomi,

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 73

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Op.Cit., hlm. 41

pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, diskriminasi rasial dan soial)”<sup>28</sup>.

“Pengertian demikian terlihat dalam pernyataan-pernyataan kongres PBB yang dikemukakan di atas. Namun di samping itu, bertolak dari konsep “*treatmen of society*” patut pula kiranya dikembangkan kebijakan system pemidanaan (termasuk “*treatment*”) yang bersifat struktural/fungsional”. Dalam sistem pemidanaan yang struktural/fungsional, pertanggungjawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan fragmentair pada pelaku kejahatan, tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. “Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan embin/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktur/fungsional mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahtan serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat/kerugian yang timbul pada diri korban”. Dengan demikian,”kebijakan integral dalam penanggulanagan kejahatan” mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pidanannya, yaitu keterpaduan anantara sistem pemidanaan yang individual/personal dan sistem pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 51-52

<sup>29</sup> Ibid

## C.2. Kebijakan Hukum Pidana

Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :<sup>30</sup>

- a. “Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana”.
- b. “Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi”.
- c. “Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”.

“Marc Anel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*”, dan “*Penal Policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Op.Cit.,hlm.1

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.<sup>31</sup>

Bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>32</sup>

Istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa istilah “kebijakan hukum pidana” dapat diartikan pula sebagai “politik hukum pidana”, dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Sudarto mengatakan, “politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat”.<sup>33</sup>

Di dalam bukunya Barda Nawawi, Sudarto menyatakan, “bahwa melaksanakan “politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm, 23

<sup>32</sup> Ibid, hlm, 24

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 26.

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan pearaturan perundang-undnagan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>34</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan “menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan saksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar”. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. “Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya”.<sup>35</sup>

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif (Non Penal) yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid, hlm.30



bagian dari politik kriminil yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif (Penal) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan.<sup>36</sup>

a. Non Penal

“Upaya non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *“prefentive”* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal”.<sup>37</sup>

b. Penal

“Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui

---

<sup>36</sup> Soedarto, 1986 Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 113-116.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Op.Cit.,hlm. 42

berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum”.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief. 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22